PERAN KOMITE DALAM PELAYANAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI MAN 1 PIDIE

SKRIPSI

Diajukan oleh

MAGHFIRAZI MULYADI

NIM. 271324685

Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Prodi Manajemen Pendidikan Islam

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

BANDA ACEH

2018 M/1439 H

PERAN KOMITE DALAM PELAYANAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI MAN 1 PIDIE

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Beban Studi untuk Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Pendidikan Islam

Oleh

MAGHFIRAZI MULYADI
NIM. 271324685
Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Program studi Manajemen Pendidikan Islam

Disetujui oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. Ismail Anshari, MA	**Dra. Jamaliah Hasballah, MA**
NIP. 196312311994021002	NIP. 196010061992032001

PERAN KOMITE DALAM PELAYANAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI MAN 1 PIDIE

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta
Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Pendidikan Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 1 Februari 2018
15 jumadil Awwal 1439

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Ismail Anshari, MA	**Dra. Cut Nya Dhin, M. Pd**
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Basidin Mizal, M. Pd	**Dra. Jamaliah Hasballah, MA**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh

Dr. Mujiburrahman, M. Ag
NIP. 197109082001121001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Maghfirazi Mulyadi
NIM : 271324685
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **Peran Komite dalam Pelayanan Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 1 Pidie** adalah benar karya asli saya, kecuali lampiran yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Februari 2018
Yang menyatakan

Maghfirazi Mulyadi
NIM. 271324685

ABSTRAK

Nama	: Maghfirazi Mulyadi
NIM	: 271324685
Fakultas/Prodi	: Tarbiyah dan Keguruan / Manajemen Pendidikan Islam
Judul	: Peran Komite dalam Pelayanan Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 1 Pidie
Tanggal Sidang	: 1 Februari 2018
Tebal Skripsi	: 77 Halaman
Pembimbing I	: Drs. Ismail Anshari, MA
Pembimbing II	: Dra. Jamaliah Hasballah, MA
Kata Kunci	: Komite Madrasah, Peran Komite

Komite Madrasah berkedudukan penting di setiap satuan pendidikan, yang bertujuan untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan, meningkatkan peran dan tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu. Komite Madrasah merupakan lembaga yang mandiri yang berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk menjelaskan mengenai Peranan Komite Madrasah dalam bidang pelayanan peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie, hambatan yang dihadapi oleh Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie dan upaya yang dilakukan Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Sekolah, guru-guru, staf dan komite sekolah serta orang tua siswa. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan tehnik wawancara, observasi nonpartisipan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengurus komite Madrasah sudah menjalankan perannya dengan baik, yaitu sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*), serta sebagai badan penghubung (*mediator agency*), dan terdapat beberapa kendala yang dihadapi komite sekolah dalam Pelayanan peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie yang harus diatasi agar pengelolaan pendidikan dapat berjalan dengan lancar serta upaya yang dilakukan komite dalam peningkatan mutu pendidikan dengan memaksimalkan potensi dan sumberdaya dengan baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT karena atas kuasa dan kehendak dari-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **"Peran Komite dalam Pelayanan Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 1 Pidie"** dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam juga disanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya kesempatan, bantuan, bimbingan dan arahan, serta dukungan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.
2. Bapak Dr. Basidin Mizal, M.Pd, selaku Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam, para staf dan jajarannya.
3. Penasehat Akademik (PA) Bapak Prof. Dr. H. M. Nasir Budiman, MA, yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan proposal penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Ismail Anshari, MA. selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Jamaliah Hasballah, MA. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan dan meluangkan waktu serta pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala MAN 1 Pidie dan Ketua Komite MAN 1 Pidie serta Sekretaris Komite MAN 1 Pidie yang telah membantu penelitian serta memberikan data dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ayahanda dan ibunda yang telah mendidik penulis dari kecil sehingga menjadi anak-anak yang senantiasa berusaha memberikan yang terbaik kepada semua.
7. Kawan-kawan seperjuangan angkatan kuliah 2013 prodi MPI yang telah bekerjasama dalam menempuh dunia pendidikan dan saling memberi motivasi.

Mudah-mudahan atas partisipasi dan motivasi yang sudah diberikan dapat menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah SWT. Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun disadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaannya dan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. *Aamiiiin Ya rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 15 Januari 2018

Penulis

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 : Jumlah Siswa MAN 1 Pidie Tahun Ajaran 2017-2018..... 36

TABEL 4.2 : Jumlah Guru dan Pegawai MAN 1 Pidie Tahun Ajaran 2017-2018... 38

TABEL 4.3 : Sarana dan Prasarana MAN 1 Pidie Tahun Ajaran 2017-2018..... 39

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi 66
LAMPIRAN 2 : Surat Izin Penelitian dari Dekan FTK UIN Ar-Raniry 67
LAMPIRAN 3 : Surat Keterangan selesai Penelitian 68
LAMPIRAN 4 : Kisi-kisi Instrumen Penelitian..... 69
LAMPIRAN 5 : Wawancara dengan Kepala Sekolah..... 71
LAMPIRAN 6 : Wawancara dengan Ketua Komite Sekolah..... 72
LAMPIRAN 6 : Wawancara dengan Sekretaris Komite Sekolah 73
LAMPIRAN 6 : Wawancara dengan Guru 74
LAMPIRAN 6 : Wawancara dengan Orangtua siswa..... 75
LAMPIRAN 8 : Dokumentasi Penelitian 76
LAMPIRAN 9 : Daftar Riwayat Hidup Penulis 77

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR LAMPIRAN ix
DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Definisi Operasional 6

BAB II PEMBAHASAN
A. Komite Sekolah 8
1. Pengertian Komite Sekolah 8
2. Kedudukan Komite Sekolah 9
3. Tujuan Komite Sekolah 10
4. Peran Komite Sekolah 11
5. Struktur Organisasi Komite Sekolah 16
B. Mutu Pendidikan 20
1. Pengertian Mutu Pendidikan 20
2. Faktor Yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan 24

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 29
B. Lokasi Penelitian 29
C. Subjek Penelitian 30
D. Tehnik Pengumpulan Data 30
E. Tehnik Analisis Data 32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 35
B. Hasil Penelitian 39
C. Pembahasan Hasil Penelitian 54

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 61
B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN-LAMPIRAN 66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah telah berupaya mewujudkan amanah tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana dan prasana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar. Pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai salah satu bagian dari otonomi daerah telah meningkatkan peran serta masyarakat di bidang pendidikan hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya wadah yang dapat mengakomodasikan pandangan, aspirasi dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin terciptanya demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas di bidang pendidikan, salah satu wadah ditingkat satuan pendidikan adalah adanya Komite Sekolah.

Keberadaan komite sekolah diperkuat dari aspek yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Kepmendiknas Nomor. 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah. Komite sekolah dibentuk sebagai bagian dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan mempunyai kewenangan untuk mengelola dirinya sendiri. Pengelolaan sekolah ini dijalankan dengan asas partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, artinya dalam pengelolaan sekolah kepala sekolah bekerja sama

dengan masyarakat sekolah. Oleh sebab itu, diperlukan wadah yang dapat dipakai oleh masyarakat sekolah untuk mengemban amanat tersebut yaitu komite sekolah.[12]

Komite Sekolah (Komite Madrasah) merupakan lembaga yang mandiri yang berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan[13]. Komite sekolah dibentuk di setiap sekolah sebagai hasil dari lahirnya Surat Keputusan Menteri No. 202 mengenai desentralisasi, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut diharapkan Komite dapat bekerjasama dengan kepala sekolah sebagai partner untuk mengembangkan kualitas sekolah dengan menggunakan konsep manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang demokratis, transparan, dan akuntabel.[14]

Komite Sekolah telah mengubah pendekatan pengelolaan pendidikan ke arah *school governance*, di mana masyarakat sebagai *stakeholder* pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan dan merupakan pelengkap dari pengaturan sekolah yang telah ada yaitu Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam otonomi pendidikan sekarang ini peranan sebagai *stakeholder* akan tersebar kapada pihak yang berkepentingan, tidak hanya di tangan aparat pemerintah pusat.[15]

---

[12] I Putu Eka Amerta dkk, Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan, Jurnal FKIP UNILA, 2009, h. 2.

[13] https://suparlan.org/77/komite-sekolah-kondisi-masalah-dan-tantangan-di-masa-depan, Diakses Pada Tanggal 06 Februari 2017, Pukul 15.56 WIB.

[14] http://mbeproject.net/mbe510.html, Diakses Pada Tanggal 06 Februari 2017, Pukul 15.58 WIB.

[15] http://www.blog-guru.web.id/2012/08/pelaksanaan-tugas-komite-sekolah-dalam.html, Diakses Pada Tanggal 06 Februari 2017, Pukul 16.00 WIB.

Salah satu tujuan dibentuknya Komite Sekolah adalah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan mutu pendidikan serta kemampuan sumber dayanya. Oleh karena itu setelah dibentuknya Komite Sekolah, maka Komite Sekolah haruslah mewujudkan tujuan-tujuan yang telah direncanakan, sehingga dapat mengembangkan potensi-potensi siswa dan mendorong perkembangan penyelenggaraan pendidikan dari sekolah tersebut.

Komite Sekolah merupakan wadah bagi orangtua siswa dan masyarakat yang peduli pendidikan untuk membantu memajukan pendidikan sekolah, seperti membantu menyelenggarakan fasilitas pembelajaran, atau meningkatkan kesejahteraan guru. Pada intinya tugas komite sekolah dapat membantu mempercepat atau mengoptimalkan upaya peningkatan mutu pendidikan, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar tentang program-program yang akan dilaksanakan oleh sekolah.[16]

Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa:

> Komite Sekolah/Madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka salah satu peranan yang dimiliki oleh Komite Sekolah adalah meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di bidang sarana dan prasarana, namun adakalanya peranan Komite

---

[16] Hana Titisari, *Peran Komite Sekolah Dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (Mbs) Di Sma Negeri 3 Kota Semarang*, Skripsi, Fakultas ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, h. 71.

sekolah dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di bidang sarana dan prasarana tidak dijalankan secara maksimal. Seperti halnya yang terjadi pada MAN 1 Pidie, sarana fasilitas sekolah yang terdapat di sekolah tersebut belum memadai yaitu seperti masih terdapatnya lapangan sekolah yang tidak layak serta peralatan teknologi yang tidak memadai.[17]

Dengan demikian, hal tersebut jelaslah menimbulkan suatu kerugian bagi siswa yang ada di MAN 1 Pidie tersebut yaitu tidak terwujudnya sistem pendidikan yang layak dan berkualitas. Padahal jika ditinjau dari Anggaran Dasar Komite MAN 1 Sigli Kabupaten Pidie salah satu fungsi komite Sekolah adalah memberikan pertimbangan terhadap kriteria fasilitas pendidikan.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Peran Komite dalam Pelayanan Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 1 Pidie."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimanakah peranan Komite Madrasah dalam bidang pelayanan peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie?

[17] Hasil Observasi Awal, di MAN 1 Pidie, Pada Tanggal 5 September 2017, Pukul 10.00 WIB.

3. Apa saja upaya yang dilakukan Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan mengenai Peranan Komite Madrasah dalam bidang pelayanan peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie.
2. Untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi oleh Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai peran Komite Madrasah dalam meningkatkan pelayanan mutu pendidikan
2. Secara praktis**,** memberikan sumbangan pemikiran di bidang Managemen Pendidikan pada umumnya dan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis.

E. Definisi Operasional

1. Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.[18] Peran yang dimaksud ialah peran komite sekolah yaitu dalam memberikan pertimbangan, sebagai pendukung, pengontrol, dan mediator.
2. Komite yang dimaksud peneliti ialah komite Madrasah. Komite Madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah.[19]
3. Pelayanan adalah sebuah usaha pemberian bantuan ataupun pertolongan pada orang lain, baik dengan berupa materi atau juga non materi agar orang tersebut bisa mengatasi masalahnya itu sendiri.[20] Pelayanan yang dimaksud ialah bagaimana upaya yang dilakukan komite sekolah dalam memberikan perimbangan, arahan, dukungan sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
4. Peningkatan adalah upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan

---

[18] Http://Www.Materibelajar.Id/2016/01/Definisi-Peran-Dan-Pengelompokan-Peran.Html, Diakses Pada Tanggal 07 Februari 2018, Pukul 18.32 WIB.

[19] Https://Edyutomo.Com/Peran-Komite-Sekolah/, Diakses Pada Tanggal 07 Februari 2018, Pukul 18.33 WIB.

[20] http://www.spengetahuan.com/2016/10/pengertian-pelayanan-menurut-para-ahli-lengkap.html, Diakses Pada Tanggal 07 Februari 2018, Pukul 18.35 WIB.

dan kemampuan agar menjadi lebih baik.[21] Peningkatan ini bisa diartikan menjadikan sesuatu yang ada menjadi lebih baik.

5. Mutu Pendidikan adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan, dalam konteks pendidikan, mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan.[22]

[21] http://www.duniapelajar.com/2014/08/08/pengertian-peningkatan-menurut-para-ahli/, Pada Tanggal 07 Februari 2018, Pukul 18.37 WIB.

[22] Umeidi, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*,(Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Mene*ngah,* 2001), h. 25

BAB II

PEMBAHASAN

A. Komite Sekolah

1. Pengertian Komite Sekolah

Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.[23]

Pasal 54 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa:

> Komite sekolah adalah lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Komite sekolah dapat juga diartikan sebagai suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Komite sekolah terdiri atas orang tua/wali murid, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan/guru, wakil alumni, dan wakil dari siswa (khusus untuk SLTA). Anggota komite juga disebutkan sekurang-kurangnya berjumlah sembilan. Anggota komite dapat melibatkan dewan guru dan yayasan atau

[23]Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 89.

lembaga penyelenggara pendidikan maksimal berjumlah tiga orang. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan komite sekolah biasanya ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART). Untuk penamaan badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti komite sekolah, majelis madrasah, majelis sekolah, komite TK, atau nama-nama lain yang disepakati bersama.[13]Sebelum dibentuk komite sekolah, dikenal adanya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) di tiap-tiap sekolah dan Persatuan Orang tua Murid dan Guru (POMG).

2. Kedudukan Komite Sekolah

Berdasarkan Pasal 4 buku pedoman kerja komite sekolah dijelaskan bahwasannya kedudukan komite sekolah adalah sebagai lembaga mandiri atau organisasi diluar struktur organisasi sekolah yang lazim disebut organisasi nonstruktural, akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan sekolah sebagai mitra kerja sekolah.[14] Komite sekolah berkedudukan pada satuan pendidikan sekolah, pada seluruh jenjang pendidikan, pendidikan dasar (Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah), hingga pendidikan menengah (Madrasah Aliyah), baik madrasah negeri maupun swasta.

Satuan pendidikan dalam berbagai jalur, jenjang dan jenis pendidikan memiliki penyebaran lokasi dan beragam. Ada madrasah tunggal, dan ada pula

[13]Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*..., h. 90.

[14]Sukirno, *Pedoman Kerja Komite Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Widyamata, 2006), h. 90.

beberapa madrasah yang menyatu dalam satu komplek. Oleh karena itu maka komite sekolah dapat dibentuk melalui beberapa alternatif sebagai berikut:

a. Komite sekolah/madrasah yang dibentuk di satuan pendidikan.
b. Terdapat beberapa sekolah/madrasah pada satu lokasi atau beberapa sekolah/madrasah yang berbeda jenjang tetapi berada pada satu lokasi yang berdekatan, atau beberapa madrasah yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya, dapat dibentuk koordinator komite sekolah/madrasah.[15]

3. Tujuan Komite Sekolah

Berdasarkan buku pedoman kerja komite sekolah bab III pasal 8 telah dijelaskan bahwa dibentuknya komite sekolah bertujuan meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi orang tua/wali siswa dan tokoh masyarakat sebagai anggota komite sekolah dalam membantu keberhasilan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah/madrasah yang bersangkutan.[16]

Adapun tujuan dibentuknya komite sekolah yang telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah sebagai organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut:

a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan,

[15]Khaeruddin dkk., *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP),*Cet. II (Jogjakarta: Nuansa Aksara, 2007), h. 249.
[16] Sukirno, *Pedoman Kerja Komite Sekolah...*, h. 3.

b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, dan
c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.[17]

Dengan demikian tujuan dibentuknya komite sekolah adalah untuk mewadahi partisipasi para stakeholder agar turut serta dalam operasional manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah secara proporsional, sehingga komite sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan. Disamping itu, badan ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Keberadaan komite sekolah/madrasah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah/madrasah.[18] Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada.

4. Peran Komite Sekolah

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah.[19] Sayangnya ungkapan bijak tersebut sampai saat ini lebih bersifat slogan dan masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Boleh dikatakan tanggung jawab masing-masing masih belum optimal, terutama peran serta masyarakat yang sampai saat ini masih dirasakan belum banyak diberdayakan.

Peran masyarakat dalam pendidikan telah dikemukakan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 54. Dan secara lebih

[17] Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*..., h. 90.
[18] Khaeruddin dkk., *Kurikulum Tingkat*..., h. 250.
[19] Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*...., h. 91.

spesifik, pada pasal 56 disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite madrasah, yang berperan sebagai berikut:

a. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
b. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, provisi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
c. Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.[20]

Atas dasar untuk pemberdayaan masyarakat itulah, maka digulirkan konsep komite sekolah sebagaimana dikemukakan diatas. Berdasarkan Keputusan Mendiknas No. 044/U/2000, komite sekolah berperan sebagai berikut:

a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
b. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
d. Mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.[21]

Komite sekolah mempunyai penjabaran peran dalam kegiatan operasional komite sekolah, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

1) Sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan indikator kinerjanya dengan memberikan masukan dan pertimbangan mengenai:
   a) Kebijakan pendidikan;

[20] Khaeruddin dkk., *Kurikulum Tingkat...*, h. 251.
[21] Khaeruddin dkk., *Kurikulum Tingkat...*, h. 252.

b) Program Pendidikan;
c) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
d) Kriteria kinerja satuan;
e) Kriteria tenaga kependidikan;
f) Kriteria fasilitas pendidikan.

2) Sebagai pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, indikator kinerjanya yaitu:
   a) Mendorong orang tua untuk berpartisipasi dalam pendidikan;
   b) Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan;
   c) Menggalang dana dalam rangka pembiayaan pendidikan;
   d) Mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
   e) Mendorong tumbuhnya komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3) Sebagai pengontrol (*controlling agency*), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, indicator kinerjanya yaitu:
   a) Melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan;
   b) Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan program penyelenggaraan pendidikan;
   c) Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan program keluaran pendidikan.

4) Sebagai mediator, dengan masyarakat di satuan pendidikan, indikator kinerjanya yaitu:

a) Melakukan kerja sama dengan masyarakat;

b) Menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.[22]

Sementara itu, untuk menjalankan perannya, komite sekolah berfungsi sebagai berikut:

a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
b. Melakukan upaya kerja sama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
   1) Kebijakan dan program pendidikan;
   2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
   3) Kriteria kinerja satuan pendidikan;
   4) Kriteria tenaga pendidikan;
   5) Kriteria fasilitas pendidikan;
   6) Hal-hal yang terkait dengan pendidikan.

[22] Hasbullah, *Otonomi Pendidikan* ...., h. 92.

e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
h. Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
i. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga dan pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.[23]

Peran komite sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, mendukung penyelenggaraan pendidikan, mengontrol dan mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Di samping itu juga berfungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan berkualitas, melakukan kerjasama dengan masyarakat, menampung dan menganalisa aspirasi, memberi masukan, mendorong orang tua murid dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana dari masyarakat dan melakukan evaluasi. Maka dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, orang tua dan masyarakat mempunyai potensi signifikan dalam berperan aktif. Antara lain orang tua turut belajar kaitannya dengan birokrasi

[23] Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*...., h. 93.

kependidikan skala kecil dalam satuan pendidikan (sekolah), mendorong aktif kegiatan di sekolah, menciptakan situasi keakraban yaitu dengan diskusi di rumah, dan juga orang tua perlu mengetahui perkembangan anaknya di sekolah serta turut serta dalam pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar.

5. Struktur Organisasi Komite Sekolah

Pembentukan komite sekolah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Dilakukan secara transparan adalah bahwa komite sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara akuntabel adalah bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan. Dilakukan secara demokratis adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Jika dipandang perlu, pemilihan anggota dan pengurus dilakukan melalui pemungutan suara.[24]

a. Keanggotaan Komite Sekolah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Disamping itu unsur dewan guru, yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa (BPD) dapat pula dilibatkan sebagai anggota komite sekolah. Jumlah anggota komite sekolah sekurang-kurangnya sembilan orang. Syarat-syarat, hak dan

[24] Hasbullah, *Otonomi Pendidikan...*, h. 99.

kewajiban, serta masa keanggotaan komite sekolah ditetapkan di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).[25]Anggota komite sekolah dibentuk dengan ketentuan-ketentuan unsur tertentu, misalnya:

1) Unsur masyarakat yang berasal dari orang tua atau wali peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha atau industri, organisasi profesi tenaga pendidikan, wakil alumni, dan khusus untuk jenjang pendidikan menengah wakil peserta didik.
2) Unsur dewan guru paling banyak 15% dari jumlah anggota komite sekolah.
3) Unsur yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan.
4) Badan Pertimbangan Desa dan lain-lain yang dianggap perlu dapat pula dilibatkan sebagai anggota komite sekolah (sebanyak-banyaknya berjumlah 3 orang).
5) Perwakilan dari organisasi siswa, bagi Madrasah Aliyah.[26]

a. Kepengurusan Komite Sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pengurus komite sekolah dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan ketua komite dianjurkan bukan berasal dari kepala satuan pendidikan. Yang menangani urusan administrasi komite sekolah sebaiknya juga bukan pegawai sekolah.

---

[25] Hasbullah, *Otonomi Pendidikan....*, h. 100.
[26]Khaeruddin dkk., *Kurikulum Tingkat...*, h. 252.

Pengurus komite sekolah adalah personal yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis danterbuka dalam musyawarah komite sekolah.
b. Masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota komite sekolah.
c. Jika diperlukan komite sekolah dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya.

Mekanisme kerja pengurus komite sekolah dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Pengurus komite sekolah terpilih bertanggungjawab kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi AD dan ART.
b. Pengurus komite sekolah menyusun program-program kerja yang disetujui melalui musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan peserta didik.
c. Apabila pengurus komite sekolah terpilih dinilai tidak produktif dalam masa jabatannya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan mengganti dengan kepengurusan baru.
d. Pembiayaan pengurus komite sekolah diambil dari anggaran komite sekolah yang ditetapkan melalui musyawarah.[27]

[27]Khaeruddin dkk., *Kurikulum Tingkat*..., h. 254.

Pengurus dari anggota komite sekolah yang telah dipilih secara demokratis harus segera menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Oleh karena itu, pada umumnya ada pembentukan tim kecil yang diberi tugas untuk menyusun rancangannyakemudian dibahas dalam rapat-rapat pleno komite sekolah.

Berdasarkan Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/202, Anggaran Dasar (AD) komite sekolah sekurang-kurangnya memuat:

a. Nama dan tempat kedudukan,
b. Dasar, tujuan dan kegiatan,
c. Keanggotaan dan kepengurusan,
d. Hak dan kewajiban anggota dan pengurus,
e. Keuangan,
f. Mekanisme kerja-kerja dan rapat-rapat, dan
g. Perubahan AD dan ART, serta pembubaran organisasi.

Sedangkan untuk Anggaran Rumah Tangga (ART) sekurang-kurangnya memuat:

a. Mekanisme pemilihan dan penetapan anggota dan pengurus,
b. Rincian tugas komite sekolah,
c. Mekanisme rapat,
d. Kerjasama dengan pihak lain,
e. Ketentuan penutup.[28]

B. Mutu Pendidikan

1. Pengertian Mutu Pendidikan

Menurut Umeidi secara umum mutu adalah "gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam

[28] Khaeruddin dkk., *Kurikulum Tingkat*..., h. 255.

memuaskan kebutuhan yang diharapkan."[29] Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan output pendidikan.

Input pendidikan adalah segala hal yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Segala hal yang dimaksud meliputi sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumberdaya meliputi sumberdaya manusia (kepala sekolah, guru termasuk guru BP, karyawan, siswa) dan sumberdaya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan dan lain sebagainya). Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang - undangan, deskripsi tugas, rencana, program dan lain sebagainya. Input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik.[30]

Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut.

Proses pendidikan merupakan kejadian berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedang sesuatu dari hasil proses disebut output. Dalam pendidikan berskala mikro (tingkat sekolah), proses yang dimaksud meliputi proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, proses

---

[29]Umeidi, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.,*(Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,2001), h. 25.

[30] Rohiat, *Manajemen Sekolah; Teori Dasar dan Praktik,* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 52.

belajar mengajar, serta proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya.[31]

Proses dikatakan bermutu apabila pengkordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dan sebagainya) dilakukan secara harmonis dan terpadu, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Kata memberdayakan mengandung arti bahwa peserta didik tidak sekedar menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, akan tetapi pengetahuan tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang lebih penting lagi peserta didik tersebut mampu belajar secara terus menerus (mampu mengembangkan dirinya).

Output pendidikan merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektifitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya.

Khusus yang berkaitan dengan mutu output sekolah dapat dijelaskan bahwa, output sekolah dikatakan berkualitas/bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam:

---

[31] Rohiat, *Manajemen Sekolah*..., h. 52.

a. prestasi akademik, berupa nilai ulangan harian, nilai ulangan umum atau nilai pencapaian ketuntasan kompetensi, hasil Ebtanas, karya ilmiah, lomba akademik, karya-karya lain peserta didik;
b. prestasi non-akademik, seperti IMTAQ, kejujuran, kesopanan, dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Mutu sekolah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti misalnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.[32]

Oleh karena itu Output Pendidikan sangat bergantung pada proses-proses yang dijalankan oleh suatu lembaga pendidikan sehingga dapat menghasilkan prestasi-prestasi yang membanggakan.

Sudarwan Danim menyatakan bahwa "hasil *(output*) pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik. Sedangkan keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis ketrampilan yang diperoleh siswa selama mengikuti program ekstrakurikuler."[33]

Disamping itu, mutu keluaran (*output*) juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang dianut, moralitas, dorongan untuk maju, dan lain-lain yang diperoleh anak didik selama menjalani pendidikan.

---

[32] Rohiat, *Manajemen Sekolah...*, h. 53.

[33] Danim Sudarwan, *Visi Baru Manajemen sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 53-54.

Menurut Ace Suryadi, mutu pendidikan adalah "kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin."[34]

Disamping itu, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas yaitu lulusan yang memiliki prestasi akademik yang mampu menjadi pelopor pembaharuan dan perubahan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapinya, baik itu di masa sekarang atau masa yang akan datang. Mutu pendidikan bukanlah suatu konsep yang berdiri sendiri akan tetapi terkait erat dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Berangkat dari pengertian tersebut, maka dalam mendefinisikan mutu pendidikan adalah pendidikan yang dapat menghasilkan peserta didik yang unggul dalam pengetahuan akademik maupun non akademiknya serta mampu menanamkan dan menumbuh kembangkan pengetahuannya tersebut untuk dijadikan pandangan hidupnya, serta diwujudkan dalam sikap hidup dan dikembangkan dalam keterampilan hidupnya sehari-hari.[35]

2. Faktor yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan

Dalam peningkatan mutu pendidikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu:

---

[34]Suryadi, Ace, *Indikator mutu dan Efisiensi Pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia*, (Jakarta: Balitbang Depdikbud, 1992), h. 159.

[35]Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 8.

a. Siswa

Siswa merupakan salah satu sub-sistem yang penting dalam sistem manajemen pendidikan sekolah. Dalam dunia pendidikan, siswa merupakan komponen mentah. Artinya siswa dengan segala karakteristik awalnya merupakan subjek yang akan dididik melalui berbagai kegiatan pembelajaran di sekolah sehingga menjadi keluaran atau lulusan sebagaimana diharapkan.[36]

Peserta didik memiliki karakteristik-karakteristik tertentu, yaitu:

1) Belum menjadi pribadi dewasa sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik.
2) Masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya, sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik.
3) Memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu, yaitu kebutuhan biologis, rohani, sosial, intelegensi, emosi, kemampuan berbicara, anggota tubuh untuk bekerja (kaki, tangan, jari), latar belakang sosial, latar belakang biologis (warna kulit, bentuk tubuh dan lainnya), serta perbedaan individual.[37]

[36] Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 9.

[37] Djamarah, Syaiful Bahri, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 52.

Berkenaan dengan siswa, ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu:

1) Siswa harus diperhatikan sebagai subjek dan bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka.
2) Keadaan dan kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat, dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan wahana kegiatan yang beragam sehingga setiap siswa memiliki wahana untuk berkembang secara optimal.
3) Pada dasarnya siswa hanya akan termotivasi belajar,jika mereka menyenangi apa yang diajarkan.
4) Pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik.[38]

b. Pendidik

Guru merupakan orang pertama yang mencerdaskan manusia, orang yang memberi bekal pengetahuan, pengalaman, dan menanamkan nilai-nilai, budaya, dan agama terhadap anak didik, dalam proses pendidikan guru memegang peran penting setelah orang tua di rumah. Di lembaga pendidikan, guru menjadi orang pertama yang bertugas membimbing, mengajar, dan melatih anak didik mencapai kedewasaan.[39]

[38]Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*..., h. 121.
[39]Yamin, Martinis, *Profesionalisme Guru Dan Implementasi KTSP*, (Jakarta: Putra Grafika, 2009), h. 47.

Oleh karena itu, kualitas seorang guru harus ditingkatkan karena guru merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam kemajuan pendidikan.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana pendidikan adalah alat dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah. Tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olah raga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.[40]

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa:

(1) Setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
(2) Dewan pendidikan, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis,
(3) Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan

[40]Mulyasa, E, *Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakterisrik, dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 49.

dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana merupakan alat penunjang untuk terselenggaranya proses pendidikan demi tercapainya kualitas pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan komponen yang sangat penting dalam setiap aktivitas kegiatan, maka keberadaannya merupakan faktor penting dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan.

d. Hubungan Masyarakat

Hubungan masyarakat didefinisikan sebagai seni dan ilmu untuk menganalisis kecenderungan, memprediksi konsekuensi-konsekuensi, menasehati para pemimpin organisasi, dan melaksanakan program yang terencana mengenai kegiatan-kegiatan yang melayani, baik kepentingan organisasi maupun kepentingan publik.[41]

Hubungan sekolah dan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian penting dari sistem sosial yang lebih besar yaitu masyarakat. Sekolah dengan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien.

Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain:

1. Memajukan kualitas pembelajaran, dan pertumbuhan anak;

[41]Marno dan Supriyatno, Triyo, *Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 46.

2. Memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat;
3. Menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah.[42]

e. Keuangan

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumberdaya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.[43]

Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu: (1) pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; (2) orang tua atau peserta didik; (3) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat.[44]

[42]Marno dan Supriyatno, Triyo, *Manajemen Dan Kepemimpina*n..., h. 46.
[43]Hasbullah, *Otonomi Pendidikan...*, h. 47.
[44]Mulyasa, E, *Kurikulum Berbasis...*, h. 48.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah "suatu penelitian dengan mengumpulkan data di lapangan dan menganalisis serta menarik kesimpulan dari data tersebut".[45]

Sesuai dengan sifat dan karakter permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan memakai perspektif deskriptif, yaitu: "Metode yang meneliti suatu kondisi, pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan membuat gambaran deskriptif atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki".[46]

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di MAN 1 Pidie. Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih MAN 1 Pidie merupakan Madrasah yang paling diminati masyarakat dan peserta didiknya juga berkualitas, terbukti dari banyaknya prestasi yang diraih baik dari segi akademik maupun nonakademik. Atas asumsi tersebut peneliti tertarik untuk menjadikan MAN 1 Pidie sebagai lokasi dalam penelitian ini.

---

[45] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 106.
[46] Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 65.

C. Subjek penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah pihak-pihak yang terkait dan relevan dengan pembahasan dan secara tepat untuk dijadikan sumber data dalam penelitian ini. Berdasarkan substansi tersebut maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan komite sekolah yang ada di MAN 1 Pidie.

Subjek penelitian terdiri dari Kepala Madrasah, guru-guru, staf, komite Madrasah dan orang tua siswa. Pemilihan ini diperlukan karena dianggap telah cukup mewakili objek yang akan diteliti, dan juga hal lain yang menjadi pertimbangan adalah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi nonpartisipan

Observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan pengamatan langsung meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera yaitu melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.[47]

Teknik observasi nonpartisipan ini tidak menuntut adanya partisipasi penulis dalam kegiatan yang dilakukan oleh narasumber. Hal ini disebabkan penulis bukan termasuk guru atau staf di MAN 1 Pidie, sehingga penulis

[47] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 2002), h. 133

menggunakan teknik observasi nonpartisipan dalam artian penulis datang di tempat kegiatan orang yang diamati tetapi tidak ikut dalam kegiatan tersebut.

Metode observasi nonpartisipan ini digunakan untuk menggali informasi melalui pengamatan secara langsung terhadap kondisi objek penelitian. Dengan metode ini akan diperoleh data yang berkaitan dengan situasi secara umum di MAN 1 Pidie. Dengan teknik observasi nonpartisipan ini sangat memungkinkan bagi penulis untuk mengamati gejala-gejala penelitian secara lebih dekat. Data yang ingin diperoleh dengan teknik ini adalah mengenai keadaan lingkungan atau situasi sosial, yaitu meliputi tempat dan pelaku (praktisi Komite Madrasah).

2. Wawancara

Wawancara merupakan "salah satu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung.[48]

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini dilaksanakan dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang terstruktur secara formal kepada subjek penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya dan juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur untuk ditanyakan dalam situasi yang tidak formal untuk melengkapi hasil temuan data penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara dengan kepala sekolah, guru-guru, staf serta Komite Sekolah dan orang tua siswa yang berada di MAN 1 Pidie. Dengan alasan informan tersebut lebih mengetahui peranan komite sekolah yang ada di lembaga tersebut serta program-program yang dilaksanakan.

---

[3] Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh: Ar-Rijal, 2007), h. 57

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan sejumlah informasi tertulis mengenai data pribadi, pendidikan guru, dan arsip penting lainnya yang mendukung penelitian ini.[49] Diantara dokumen yang akan dianalisis untuk didapatkan datanya adalah: (1) profil MAN 1 Pidie, (2) program Komite Madrasah di MAN 1 Pidie, (3) peraturan-peraturan tertulis, dan data-data lain terkait dengan fokus penelitian. Data-data dokumentasi ini berfungsi untuk melengkapi dan menguatkan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Norman K. Denkin, mendefinisikan triangulasi digunakan sebagai gabungan atau kombinasi berbagi metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurut konsep Norman K. Denkin, triangulasi meliputi tiga hal:

1. Trangulasi Metode, dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Membandingkan hasil informasi wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai subjek penelitian yang telah ditentukan peneliti.
2. Triangulasi Sumber Data, dilakukan dengan cara menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber polehan data. Membandingkan hasil informasi dari subjek penelitian yaitu kepala sekolah, guru, staf dan komite sekolah serta orang tua siswa.
3. Trangulai Teori, dilakukan dengan cara mengumpulkan hasil penelitian berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Membandingkan informasi dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yag dihasilkan.[50]

---

[49] M. Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2004), h. 24

[50] Norman K. Denkin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 31.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisi data Huberman. Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya penuh.[51] Analisi data kualitatif Huberman terdapat tiga tahap:

1. Tahap Reduksi Data

   Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Tahap Penyajian Data

   Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalan bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami.

3. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

   Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang

[51] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 246.

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[52]

[52] Sugiyono, *Metode Penelitian*…, h. 252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

MAN 1 Pidie merupakan salah satu Madrasah yang menerapkan nilai-nilai agama dan moral yang baik pada peserta didiknya agar dapat berakhlakul karimah di lingkungan Sekolah dan juga lingkungan masyarakat. Adapun Madrasah ini juga memiliki kualitas pendidikan yang bermutu dan menjadi Madrasah yang paling banyak diminati masyarakat untuk menempatkan putra putrinya pada lembaga pendidikan tersebut. Madrasah ini dulu dikenal dengan nama MAN 1 Sigli, kemudian pada tanggal 17 November 2016 keluar Keputusan Menteri Agama Nomor 670 Tahun 2016 Tentang Perubahan Nama Sekolah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Sekolah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Aceh. Maka dengan Keluarnya Keputusan Menteri Agama tersebut berubahlah nama Madrasah Aliyah Negeri Sigli 1 menjadi Madarasah Aliyah Negeri 1 Pidie.

1. Visi, Misi dan Tujuan MAN 1 Pidie

1. Visi Madrasah

1) Berilmu, beriman, beramal.

2. Misi Madrasah

1) Mengembangkan pontesi akademik peserta didik secara optimal sesuai bakat dan minat.
2) Mewujudkan peserta didik yang cerdas,kreatif,kompetitif,inovatif.
3) Membina insan yang beriman dan bertaqwa serta berakhlakul karimah dan melalui keteladanan pendidikan.
4) Meningkatkan keterampilan melalui pengembangan kreatifitas siswa.

3. Tujuan Madrasah

1) Meningkatkan pengetahuan siswa untuk pendidikan pada jenjang lebih tinggi.
2) Meningkatkan pengetahuan siswa untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang dijiwai ajaran agama islam.
3) Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya yang dijiwai ajaran agama islam.
4) Terwujudnya sistem dan iklim pendidikan yang demokratis dan berkualitas.
5) Meningkatkan mutu pendidikan agama, akhlak budi pekerti, pendidikan kewarganegaraan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
6) Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam penguasaan ilmu-ilmu dasar untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Keadaan Murid

Siswa merupakan faktor terpenting dalam proses belajar mengajar di Madrasah. Berdasarkan data yang diperoleh, adapun jumlah siswa MAN 1 Pidie Tahun Ajaran 2017-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah siswa MAN 1 Pidie Tahun Ajaran 2017-2018[53]

1. Kelas X (10)

No.	Kelas / Jurusan	Jumlah Siswa	Jenis Kelamin		Wali Kelas
			L	P	
1	X IPA 1	28	0	28	Muhammad, S.Pd
2	X IPA 2	35	11	24	Warnidah, S.PdI
3	X IPA 3	36	9	27	Sariza, S.Pd
4	X IPA 4	38	8	30	Dra. Zuhra

[53] Dokumentasi dan Arsip Sekolah

No.	Kelas / Jurusan	Jumlah Siswa	Jenis Kelamin		Wali Kelas
			L	P	
5	X IPA 5	38	9	29	Yusriwati, S.Pd
6	X IPA 6	36	12	24	Cut Ratna Dewi, S.Pd
7	X IPA 7	37	7	30	Abdullah, S.Ag, MA
8	X IPS 1	19	8	11	Khamsiah, S.Ag
9	X IPS 2	23	16	7	Nurmala, S.Pd
10	X IPS 3	19	8	11	Rauzah, S.Ag
Jumlah		309	69	220	

2. Kelas XI (11)

No.	Kelas / Jurusan	Jumlah Siswa	Jenis Kelamin		Wali Kelas
			L	P	
1	XI IPA 1	30	6	24	Safrina, S.Si
2	XI IPA 2	29	5	24	Mutia, S.Ag
3	XI IPA 3	38	10	28	Muslimah, S.Pd
4	XI IPA 4	39	4	35	Nurhayati, S.Pd
5	XI IPA 5	41	8	33	Dra. Husna
6	XI IPA 6	39	8	31	Farida Hanim, S.Pd
7	XI IPS 1	40	25	15	Eva Nuriza, S.Pd
8	XI IPS 2	24	10	14	Rosniza, S.Pd
9	XI IPS 3	24	12	12	Mardhiana, S.Ag
Jumlah		304	88	216	

3. Kelas XII (12)

No.	Kelas / Jurusan	Jumlah Siswa	Jenis Kelamin		Wali Kelas
			L	P	
1	XII IPA 1	33	7	26	Linda Aryani, S.Pd
2	XII IPA 2	33	6	27	Fitri Juliana, S.KH
3	XII IPA 3	42	14	28	Inayati Putri,S.Ag
4	XII IPA 4	40	13	27	Diah Wanodiasari, S.Pd
5	XII IPA 5	40	10	30	Nurhayati Yunus, S.Ag
6	XII IPA 6	40	12	28	Eliana,S.Ag
7	XII IPS 1	28	15	13	Dra. Fauziah
8	XII IPS 2	18	9	9	Masnawati, S.Pd
9	XII IPS 3	20	9	11	Nurjani, S.Ag
Jumlah		294	95	199	

3. Tenaga Pengajar

Adapun jumlah guru dan pegawai MAN 1 Pidie Tahun Ajaran 2017-2018 dapat dilihat pada daftar tabel berikut ini:

Tabel 4.2: jumlah guru dan pegawai MAN 1 Pidie Tahun Ajaran 2017-2018[54]

No.	Tenaga Pendidik	Kualifikasi Pendidikan	Jenis Kelamin		Pangkat	Jumlah
			LK	PR		
1	Kepala Sekolah (PNS)	SI/D4	1	0	IV/a	1
2	Guru (PNS)	SI/D4 (47 orang)	11	36	III (20 org) IV(47 org)	47
3	Guru (Non PNS)	SI/D4 (17 orang)	5	17	II (1 org) III (2org)	22
4	Tenaga Non Guru/ TU (PNS)	<SI (1 orang) SI/D4 (2 orang)	1	2	-	3
5	Tenaga Non Guru/TU(Non PNS	<SI (4 orang) SI/D4 (3 orang)	4	3	-	7
6	Guru yang Sudah Sertifikasi	-	-	-	-	46 (PNS)
7	Guru yang Belum Sertifikasi	-	-	-	--	1 (PNS) 17 (Non PNS)

4. Keadaan Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar di yang terdapat di MAN 1 Pidie adalah sebagai berikut:

[54] Dokumentasi dan Arsip Sekolah

Tabel 4.3: **Sarana Dan Prasarana MAN 1 Pidie Tahun Ajaran 2017-2018**[55]

No.	Ruang	Keadaan Ruangan			Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Ruang Kepala Sekolah	1	-	-	1
2	Ruang Tata Usaha	2	-	-	2
3	Ruang Guru	2	-	-	2
4	Ruang Kelas	22	6	-	28
5	Ruang Laboratorium	3	-	-	3
6	Ruang Perpustakaan	1	-	-	1
7	Toilet Siswa	7	3	-	10
8	Toilet Guru	2	-	-	2
9	Ruang UKS	1	-	-	1
10	Mushalla	1	-	-	1
11	Meja Siswa	500	67	171	738
12	Meja Guru	159	40	62	261
13	Bangku Siswa	910	57	54	1021
14	Komputer	36	20	10	66
15	Laptop	5	-	-	5
16	Printer	10	-	9	19

B. Hasil Penelitian

1. Penyajian Data

a. Peranan Komite Madrasah dalam bidang pelayanan peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie

Berdasarkan wawancara mengenai peranan Komite Madrasah dalam bidang pelayanan peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie, peneliti

[55] Dokumentasi dan Arsip Sekolah

menanyakan “Bagaimana proses pembentukan komite Madrasah di MAN 1 Pidie?”

Menurut Kepala MAN 1 Pidie proses pembentukan komite Sekolah di MAN 1 Pidie dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan lain sebagainya. Pembentukan komite itu sendiri membutuhkan jangka waktu yang sangat panjang mulai dari menetapkan anggotanya dan menyeleksi siapa yang layak menjadi pengurus komite dan hal itu harus dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat baik itu dari pihak Sekolah dan juga lapisan masyarakat.[56]

Menurut Ketua Komite MAN 1 Pidie Proses pembentukan Komite dilakukan secara musyawarah secara terbuka, hal itu dilakukan agar seluruh elemen baik itu pihak Madrasah seperti guru, kepala Madrasah atau penyelenggara pendidikan dan orang tua peserta didik serta tokoh masyarakat mengetahui mengenai tengah dilaksanakannya pembentukan komite.[57]

Menurut Sekretaris Komite MAN 1 Pidie proses pembentukan komite dilakukan dengan sangat baik yaitu dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan mengedepankan musyawarah sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada satu pihakpun merasa dicurangi dengan pembentukan komite tersebut.[58]

[56] Wawancara dengan Kepala MAN 1 Pidie, Tanggal 2 November 2017.
[57] Wawancara dengan Ketua Komite MAN 1 Pidie, Tanggal 3 November 2017.
[58] Wawancara dengan Sekretaris Komite MAN 1 Pidie, Tanggal 3 November 2017.

Pertanyaan selanjutnya, mengenai pembentukan komite Komite Madrasah di MAN 1 Pidie, "Apakah ada kriteria khusus dalam pembentukan komite Madrasah di MAN 1 Pidie?"

Menurut Kepala MAN 1 Pidie terdapat beberapa kriteria untuk seseorang dapat diangkat sebagai komite yaitu seorang Komite haruslah memenuhi persyaratan khusus yaitu beriman, jujur dan bertanggung jawab terhadap jabatan yang akan diserahkan kepadanya sehingga dapat memberikan rasa percaya bagi pihak Sekolah maupun masyarakat.[59]

Ketua Komite di MAN 1 Pidie mengemukakan bahwa terdapat berbagai persyaratan untuk menjadi komite Madrasah diantaranya harus sehat jasmani dan rohani, mempunyai komitmen yang tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan, memiliki keikhlasan hati dan harus beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt.[60]

Menurut Sekretaris Komite MAN 1 Pidie syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang Komite adalah harus bersedia menjadi anggota komite dengan ikhlas serta memiliki komitmen untuk memajukan pendidikan. Faktor yang paling penting yaitu harus beriman kepada Allah Swt serta tidak menuntut imbalan dikarenakan pekerjaan sebagai seorang komite adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan pengorbanan.[61]

Pertanyaan selanjutnya, mengenai pembentukan komite Komite Madrasah di MAN 1 Pidie, "Seberapa penting keberadaan komite Madrasah di MAN 1 Pidie?"

---

[59] Wawancara dengan Kepala..., Tanggal 2 November 2017
[60] Wawancara dengan Ketua..., Tanggal 3 November 2017
[61] Wawancara dengan Sekretaris..., Tanggal 3 November 2017

Menurut orang tua siswa MAN 1 Pidie Komite sangatlah penting keberadaannya tanpa komite Sekolah belumlah lengkap. Komite Madrasah didirikan bertujuan untuk meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Mewadahi dan menyalurkan, aspirasi, dan prakarsa masyarat dalam melahirkan, kebijakan, serta program Sekolah. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis.[62]

Adapun peran komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan, diantaranya yaitu:

1) Peranan Komite MAN 1 Pidie sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*)

Berdasarkan wawancara mengenai peranan komite Madrasah dalam bidang pelayanan peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie, peneliti menanyakan, ‘‘Bagaimana pelayanan yang diberikan komite dalam pemberian pertimbangan di MAN 1 Pidie?’’

Waka. Kurikulum MAN 1 Pidie menyatakan bahwa peran komite di MAN 1 Pidie sangat penting, dengan adanya Komite Madrasah maka terdapat masukan berupa ide-ide, pemikiran serta sumbangan yang dapat membantu Sekolah serta menjaga agar Sekolah dapat berjalan dengan sebaik mungkin.[63]

Pertanyaan selanjutnya, mengenai peran komite sebagai pemberi pertimbangan, peneliti menanyakan, ‘‘Bagaimana kinerja dan program kerja

[62] Wawancara dengan orang tua siswa MAN 1 Pidie, Tanggal 3 November 2017.

[63] Wawancara dengan Wakil Kepala Bagian Kurikulum, Tanggal 4 November 2017.

komite Madrasah dalam perencanaan proses pengelolaan pendidikan di MAN 1 Pidie?"

Waka. Kesiswaan MAN 1 Pidie menyatakan bahwa kami sangat bangga dengan kinerja dan program-program yang telah dibuat oleh Komite diantaranya penerapan les sore bagi kelas XII dalam menghadapi UN Tahun 2017/2018 dan program kelas unggul bagi kelas X dan XI guna meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie.[64]

Pertanyaan selanjutnya, mengenai peran komite sebagai pemberi pertimbangan, peneliti menanyakan, "Bagaimana peran komite Madrasah dalam penyusunan RAPBM?"

Ketua Komite MAN 1 Pidie mengemukakan bahwa penyusunan RAPBM disusun oleh komite, dan komite juga ikut memberikan masukan dan pertimbangan dalam menyusun RAPBM. Setelah konsep tersusun Madrasah mengundang pengurus untuk membahas konsep tersebut. Kemudian Madrasah mengundang orang tua murid untuk membahas konsep RAPBM, setelah mendapat kata mufakat Sekolah dan komite melakukan pengesahan RAPBM.[65]

Pertanyaan selanjutnya, mengenai peran komite sebagai pemberi pertimbangan, peneliti menanyakan, "Bagaimana komite memberikan pertimbangan dalam menyusun RAPBM?"

Sekretaris MAN 1 Pidie mengatakan bahwa Penyusunan RAPBM mengacu pada UU kependidikan no 20 tahun 2003 dan visi misi Sekolah.

[64] Wawancara dengan Wakil Kepala Bagian Kesiswaan, Tanggal 4 November 2017.
[65] Wawancara dengan Ketua..., Tanggal 3 November 2017

Pertimbangan penyusunan RAPBM dilihat dari kebutuhan siswa bukan keinginan Madrasah, dalam artian komite Madrasah melihat dan mempertimbangkan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan siswa sehingga dapat menciptakan siswa yang pintar, terampil dan berbudi mulia.[66]

Pertanyaan selanjutnya, mengenai peran komite sebagai pemberi pertimbangan, peneliti menanyakan, "Bagaimana komite memberikan masukan atau usulan terhadap pengelolaan pendidikan?"

Ketua Komite MAN 1 Pidie mengemukakan bahwa Komite Madrasah tidak ikut campur dalam urusan teknis. Jika ada keluhan dari masyarakat, komite Madrasah menampung aspirasi tersebut dan menyampaikannya kepada Sekolah, untuk dicari solusi secara bersama-sama. Komite Madrasah turut membantu jika terjadi kendala-kendala dari Madrasah.[67]

Menurut Kepala MAN 1 Pidie Komite Madrasah dalam pengelolaan pendidikan hanya sebagai pendukung, pengontrol, dan sebagai pertimbangan, karena Komite tidak langsung ikut di pengelolaan anggaran. Dalam pengelolaan pendidikan Kepala Sekolah tetap meminta persetujuan dari komite sebagai pendukung.[68]

Pertanyaan selanjutnya, mengenai peran komite sebagai pemberi pertimbangan, peneliti menanyakan, "Bagaimana pertimbangan komite Madrasah untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan di Sekolah?"

[66] Wawancara dengan Sekretaris..., Tanggal 3 November 2017
[67] Wawancara dengan Ketua..., Tanggal 3 November 2017
[68] Wawancara dengan Kepala..., Tanggal 2 November 2017

Sekretaris Komite MAN 1 Pidie menjelaskan bahwa Komite selalu memberikan pertimbangan dan masukan dalam pengadaan sarana dan prasarana Sekolah yang mengacu pada nilai kebutuhan.[69]

Menurut Kepala MAN 1 Pidie dalam hal pengadaan sarana dan prasarana pihak Madrasah selalu memberitahukan kepada komite untuk dapat memberikan pertimbangan dan masukan akan tetapi tetap mengacu pada kebutuhan siwa bukan keinginan Sekolah.[70]

2) Peranan Komite MAN 1 Pidie sebagai pendukung (*supporting agency*)

Berdasarkan wawancara mengenai peranan komite Madrasah dalam bidang pelayanan peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie, peneliti menanyakan, "Bagaimana komite Madrasah memantau kondisi ketenagaan pendidikan di Sekolah?"

Ketua Komite MAN 1 Pidie menjelaskan bahwa Komite Madrasah tidak pernah memantau kondisi ketenagaan pendidikan di Sekolah. Komite mengetahui kondisi ketenagaan pendidikan melalui laporan tahunan di Sekolah yang biasanya dilaporkan pada saat rapat pleno.[71]

Pertanyaan selanjutnya, mengenai peran komite sebagai pendukung, peneliti menanyakan, "Bagaimana komite mengkoordinasikan sarana prasarana di Madrasah?"

Ketua Komite MAN 1 Pidie mengemukakan bahwa Komite Madrasah tidak mengkoordinasikan sarana prasaran Sekolah, komite hanya memberikan

[69] Wawancara dengan Ketua..., Tanggal 3 November 2017
[70] Wawancara dengan Kepala..., Tanggal 2 November 2017
[71] Wawancara dengan Ketua..., Tanggal 3 November 2017

pertimbangan di dalam penentuan kebutuhan, dalam pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana, pihak Sekolah yang berperan dalam hal ini.[72]

Pertanyaan selanjutnya, mengenai peran komite sebagai pendukung, peneliti menanyakan, "Bagaimana komite Madrasah memobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di Sekolah?"

Ketua Komite MAN 1 Pidie mengutarakan bahwa Komite selalu berusaha agar semua pihak dapat berperan dalam dukungan anggaran pendidikan di Madrasah. Karena itu setiap rapat, Madrasah selalu mengundang orang tua/wali murid agar ikut berperan dalam dukungan anggaran pendidikan tersebut.[73]

Menurut Kepala MAN 1 Pidie Komite Madrasah dalam pengelolaan anggaran dapat berfungsi sebagai pendukung, pengontrol, dan sebagai pertimbangan, komite turut membantu apabila Madrasah mengalami kendala dalam pengelolaan anggaran. Dan dalam pengelolaan anggaran pendidikan kepala Madrasah tetap meminta persetujuan dari komite sebagai pendukung.[74]

Pertanyaan selanjutnya, mengenai peran komite sebagai pendukung, peneliti menanyakan, "Bagaimana komite Madrasah mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di Sekolah?"

Menurut Sekretaris Komite MAN 1 Pidie Evaluasi anggaran dilaksanakan setiap tengah tahun dan akhir tahun. Tengah tahun dievaluasi agar bisa mengetahui jumlah anggaran yang masuk dan yang telah digunakan serta mengetahui kendala yang sedang terjadi. Evaluasi akhir tahun untuk dapat

[72] Wawancara dengan Ketua..., Tanggal 3 November 2017
[73] Wawancara dengan Ketua..., Tanggal 3 November 2017
[74] Wawancara dengan Kepala..., Tanggal 2 November 2017

mengetahui sejauh mana tingkat ketercapaiannya agar bisa merencanakan untuk RAPBM tahun berikutnya.[75]

3) Peranan Komite MAN 1 Pidie sebagai pengontrol (*controlling agency*)

Berdasarkan wawancara mengenai peranan komite Sekolah dalam bidang pelayanan peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie, peneliti menanyakan, "Bagaimana komite Sekolah mengawasi proses pengambilan keputusan di Madrasah?"

Ketua Komite MAN 1 Pidie mengutarakan bahwa dalam musyawarah Komite memberikan saran agar proses pengambilan keputusan dapat melibatkan semua pihak. Musyawarah dikendalikan oleh ketua komite Madrasah.[76]

Pertanyaan selanjutnya, mengenai peran komite sebagai pengontrol, peneliti menanyakan, "Bagaimana komite mengontrol proses pelaksanaan pendidikan di Madrasah?"

Ketua Komite MAN 1 Pidie mengutarakan bahwa Komite mengontrol berdasarkan dengan laporan kepala Madrasah dengan setiap rapat pleno, misalnya: pada penyelenggaraan ujian Sekolah, kita tidak mengawasi secara langsung hanya laporan dari kepala Madrasah.[77]

Menurut Kepala MAN 1 Pidie Komite memantau program Madrasah melalui rapat pleno, koordinasi, serta pelaksanaan program di MAN 1 Pidie.[78]

---

[75] Wawancara dengan Sekretaris..., Tanggal 3 November 2017
[76] Wawancara dengan Ketua..., Tanggal 3 November 2017
[77] Wawancara dengan Ketua..., Tanggal 3 November 2017
[78] Wawancara dengan Kepala..., Tanggal 2 November 2017

Pertanyaan selanjutnya, mengenai peran komite sebagai pengontrol, peneliti menanyakan, "Bagaimana komite Madrasah mengontrol penjadwalan program Sekolah dan anggaran Sekolah?"

Menurut Ketua Komite MAN 1 Pidie Sekolah selalu menyampaikan tahapan pelaksanaan program beserta anggaran yang digunakan oleh Madrasah. Untuk anggaran, kepala Sekolah selalu menyampaikan anggaran yang digunakan ataupun yang masuk pada saat rapat.[79]

Pertanyaan selanjutnya, mengenai peran komite sebagai pengontrol, peneliti menanyakan, "Bagaimana komite Madrasah memantau alokasi anggaran untuk program Madrasah?"

Menurut Sekretaris Komite MAN 1 Pidiealokasi anggaran telah direncanakan dalam RAPBM beserta dengan anggaran yang digunakan. Komite hanya memantau pelaksanaan melalui laporan keuangan yang disampaikan oleh Madrasah, dan dicocokan dengan RAPBM.[80]

Pertanyaan selanjutnya, mengenai peran komite sebagai pengontrol, peneliti menanyakan, "Bagaimana komite Sekolah memantau hasil ujian Madrasah?"

Menurut Sekretaris Komite MAN 1 Pidie Komite memantau hasil ujian Madrasah melalui laporan dari kepala Madrasah pada saat rapat pleno. Jika hasilnya baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Jika hasilnya buruk, ditanya apa kesulitannya untuk memperbaiki di tahun berikunya.[81]

4) Peranan Komite MAN 1 Pidie sebagai badan penghubung (*mediator*)

[79] Wawancara dengan Ketua..., Tanggal 3 November 2017.
[80] Wawancara dengan Sekretaris..., Tanggal 3 November 2017.
[81] Wawancara dengan Sekretaris..., Tanggal 3 November 2017.

Berdasarkan wawancara mengenai peranan komite Madrasah dalam bidang pelayanan peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie, peneliti menanyakan, "Bagaimana komite Madrasah melakukan perannya sebagai badan penghubung antara komite Madrasah dengan masyarakat, komite Madrasah dengan Sekolah, komite Madrasah dengan dewan pendidikan?"

Ketua Komite MAN 1 Pidie mengemukakan bahwa Komite Madrasah menjembatani kepentingan Madrasah dengan masyarakat. Mediator komite Madrasah dengan masyarakat dilakukan melalui rapat pleno maupun surat edaran. Demikian juga dengan dewan pendidikan. Komite menjalin hubungan dengan dewan pendidikan dari kabupaten.[82]

Pertanyaan selanjutnya, mengenai peran komite sebagai mediator, peneliti menanyakan, "Bagaimana komite Madrasah mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan?"

Ketua Komite MAN 1 Pidie mengemukakan bahwa Komite Madrasah menampung keluhan/aspirasi masyarakat, sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program kerja Madrasah. Aspirasi masyarakat dibawa kedalam rapat kemudian dipecahkan bersama-sama.[83]

Pertanyaan selanjutnya, mengenai peran komite sebagai mediator, peneliti menanyakan, "Bagaimana komite Madrasah membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada Madrasah?"

[82] Wawancara dengan Ketua..., Tanggal 3 November 2017.
[83] Wawancara dengan Ketua..., Tanggal 3 November 2017.

Menurut Ketua Komite MAN 1 Pidie program pendidikan dibuat oleh Madrasah, Komite memberikan usulan jika ada hal-hal yang perlu untuk disampaikan, dan Komite ikut melaksanakan program kerja tersebut bila diundang oleh Sekolah.[84]

Pertanyaan selanjutnya, mengenai peran komite sebagai mediator, peneliti menanyakan, "Bagaimana komite Madrasah mensosialisasikan usulan kebijakan dna program pendidikan kepada masyarakat?"

Menurut Ketua Komite MAN 1 Pidie program kerja Komite disosialisasikan kepada masyarakat melalui rapat pleno agar mendapat dukungan dari masyarakat. Selain itu juga Komite mensosialisasikan melalui surat edaran agar masyarakat mengetahui program kerja Madrasah.[85]

Pertanyaan selanjutnya, mengenai peran komite sebagai mediator, peneliti menanyakan, "Bagaimana komite Madrasah menampung pengaduan atau keluhan dari masyarakat?"

Menurut Ketua Komite MAN 1 Pidie Komite menampung pengaduan dari masyarakat, keluhan dari masyarakat, kemudian Komite menyampaikannya dalam sebuah rapat, kemudian kita pecahkan bersama-sama.[86]

b. Hambatan yang dihadapi oleh Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie

Berdasarkan wawancara mengenai Hambatan yang dihadapi oleh Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie, peneliti

[84] Wawancara dengan Ketua..., Tanggal 3 November 2017.
[85] Wawancara dengan Ketua..., Tanggal 3 November 2017.
[86] Wawancara dengan Ketua..., Tanggal 3 November 2017.

menanyakan, “Apa kendala yang dihadapi dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie?”

Ketua Komite MAN 1 Pidie menjelaskan bahwa Faktor penghambatnya adalah kesibukan masing-masing dari setiap anggota komite Madrasah. Masih adanya pengurus komite yang tidak menjalankan tugasnya, sehingga dapat menghambat dalam pelaksanaan program kerja komite Madrasah.[87]

Menurut Sekretaris Komite MAN 1 Pidie Faktor penghambat dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah (1) kesibukan pribadi dari masing-masing pengurus Komite Madrasah, sehingga dalam rapat tidak dapat dipastikan semuanya dapat hadir. Padahal rapat-rapat tersebut membahas tentang program kerja yang akan dilaksanakan maupun yang telah terlaksana. Jika yang bersangkutan tidak hadir, maka akan menghambat jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan. (2) Masih adanya pengurus Komite Madrasah yang tidak melaksanakan tugasnya. Hal ini jelas menghambat organisasi dalam melaksanakan program kerjanya. Akibatnya tanggung jawab yang seharusnya dipikul, akan membebani pengurus yang lain, yang seharusnya tidak memikul tanggung jawab tersebut. Padahal tiap-tiap pengurus Komite Madrasah sudah mempunyai tanggung jawab masing-masing. (3) Kurangnya wawasan tentang organisasi komite Madrasah, dan wawasan tentang kependidikan. Hal ini mempengaruhi cara pandang dan cara berfikir pengurus Komite Madrasah dalam melaksanakan tanggung jawabnya.[88]

[87] Wawancara dengan Ketua..., Tanggal 3 November 2017.
[88] Wawancara dengan Sekretaris..., Tanggal 3 November 2017.

c. Upaya yang dilakukan Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie

Berdasarkan wawancara mengenai upaya yang dilakukan Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie, peneliti menanyakan, "Bagaimana upaya komite Madrsah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di MAN 1 Pidie?"

Menurut Kepala MAN 1 Pidie Komite Madrasah berupaya memperbaiki kinerja sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengotrol, dan mediator. Walaupun dalam kenyataannya dalam kinerja dan program tidak ada perencanaan dan program yang tersusun, masih mengandalkan instruksi dan pemberitahuan, dan agenda hanya berdasarkan rapat dan pelaksanaan saja.[89]

Ketua Komite MAN 1 Pidie menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan komite Madrasah adalah dengan membuat program kerja. Dan program kerja tersebut merupakan penjabaran dari peran dan fungsi komite Madrasah yaitu sebagai pemberi pertimbangan kepada pihak Madrasah, pendukung baik berupa tenaga, fikiran, maupun dana, pengontrol penggunaan dana dari Sekolah dan bantuan dari pihak lain, dan sebagai mediator antara masyarakat dengan Madrasah.[90]

Menurut Sekretaris Komite MAN 1 Pidie upaya yang dilakukan komite dalam peningkatan mutu pendidikan adalah (1) Mengadakan kerja sama Pihak Madrasah dengan komite Sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. (2) Menekankan atau memaksimalkan waktu belajar

[89] Wawancara dengan Kepala..., Tanggal 3 November 2017.
[90] Wawancara dengan Ketua..., Tanggal 3 November 2017.

memberdayagunaan alat bantu belajar. (3) Memberikan jam tambahan belajar khusunya kelas 6 (les sore) dalam menghadapi UN Thn 2018/2019.[91]

2. Interpretasi Data

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala Madrasah, ketua komite Madrasah, sekertaris komite Madrasah, waka. Kurikulum dan waka. Kesiswaan serta orang tua siswa dapat dilihat bahwa Pengurus komite Madrasah sudah menjalankan perannya dengan baik, yaitu dimulai dari peran sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan di suatu pendidikan, pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan di suatu pendidikan, pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilasi penyelenggaraan dan pengeluaran dana di suatu pendidikan, serta sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat di suatu pendidikan. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa peran yang dilakukan komite Madrasah dalam pelayanan peningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie sudah cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan kepedulian komite Sekolah terutama orang tua siswa untuk membantu, menunjang dan ikut serta demi kelancaran dan pengembangan pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Madrasah, Ketua Komite Madrasah dan Sekertaris Komite Madrasah dapat dilihat bahwa adanya beberapa kendala yang dihadapi komite Madrasah dalam Pelayanan peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie diantaranya adalah (1) kesibukan pribadi dari masing-masing pengurus Komite Sekolah, (2) masih adanya pengurus Komite

[91] Bapak Ridwan, Sekretaris Komite Man 1 Pidie..., Tanggal 3 November 2017

Sekolah yang tidak melaksanakan tugasnya. (3) Kurangnya wawasan tentang organisasi komite Sekolah, dan wawasan tentang kependidikan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Madrasah, Ketua Komite Madrasah dan Sekertaris Komite Madrasah dapat dilihat bahwa adanya beberapa upaya yang dilakukan komite dalam peningkatan mutu pendidikan adalah (1) Mengadakan kerja sama Pihak Madrasah dengan komite Madrasah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. (2) Menekankan atau memaksimalkan waktu belajar memberdayagunaan alat bantu belajar. (3) Memberikan jam tambahan belajar khusunya kelas 6 (les sore) dalam menghadapi UN Thn 2018/2019.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Peranan Komite Madrasah dalam bidang pelayanan peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite Madrasah sudah menjalankan seluruh perannya dengan baik, yaitu dimulai dari peran sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), peran sebagai Pendukung (*supporting agency*), peran sebagai Pengontrol (*controlling agency*), peran sebagai Mediator (*mediator agency*). Peran yang dijalankan sudah cukup baik, mulai dari perencanaan pengelolaan pendidikan sampai dengan evaluasi pendidikan.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Mendiknas No. 044/U/2000, komite Sekolah berperan sebagai berikut:

e. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.

f. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
g. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
h. Mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.[92]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pembentukan Komite Madrasah dilakukan secara musyawarah dan terbuka, dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan mengedepankan musyawarah maka tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan dengan pembentukan komite tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan Hasbullah dalam bukunya Otonomi Pendidikan, Pembentukan komite Sekolah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Dilakukan secara transparan adalah bahwa komite Sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara akuntabel adalah bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan. Dilakukan secara demokratis adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Jika dipandang perlu, pemilihan anggota dan pengurus dilakukan melalui pemungutan suara.[93]

[92] Khaeruddin dkk., *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*,Cet. II (Jogjakarta: Nuansa Aksara, 2007), h. 251.
[93] Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 99.

Peran Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie, dilaksanakan dengan mengoptimalkan empat peran komite Sekolah, yakni:

1. Komite Sekolah bertindak sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaa kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;

   a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan dan program pendidikan.
   b. Menyusun dan menetapkan RAPBM secara bersama-sama.
   c. Memberi saran terhadap kriteria fasilitas pendidikan.
   d. Memberikan solusi dan saran dalam menetapkan tenaga pendidikan.

2. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;

   a. Mengajak wali murid untuk mengikuti rapat Madrasah.
   b. Menggalang dana untuk pengelolaan pendidikan.
   c. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.

3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;

   a. Melakukan evaluasi di setiap program pendidikan.
   b. Mengawasi program yang sedang dan yang telah berlangsung.

4. Mediator (*mediator agency*) antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan atau mediator antara masyarakat dengan satuan pendidikan;

   a. Bekerja sama dengan masyarakat.
   b. Menampung segala ide dan anspirasi dari masyarakat.

Hal ini senada dengan yang disebutkan oleh Hasbullah dalam bukunya Otonomi Pendidikan, Komite Sekolah mempunyai penjabaran peran dalam kegiatan operasional komite Sekolah, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

5) Sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan indikator kinerjanya dengan memberikan masukan dan pertimbangan mengenai:
   g) Kebijakan pendidikan;
   h) Program Pendidikan;
   i) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
   j) Kriteria kinerja satuan;
   k) Kriteria tenaga kependidikan;
   l) Kriteria fasilitas pendidikan.
6) Sebagai pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, indikator kinerjanya yaitu:
   f) Mendorong orang tua untuk berpartisipasi dalam pendidikan;
   g) Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan;
   h) Menggalang dana dalam rangka pembiayaan pendidikan;
   i) Mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
   j) Mendorong tumbuhnya komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

7) Sebagai pengontrol (*controlling agency*), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, indicator kinerjanya yaitu:
   d) Melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan;
   e) Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan program penyelenggaraan pendidikan;
   f) Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan program keluaran pendidikan.
8) Sebagai mediator, dengan masyarakat di satuan pendidikan, indikator kinerjanya yaitu:
   c) Melakukan kerja sama dengan masyarakat;
   d) Menampung aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
   e) Menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.[94]

2. Hambatan yang dihadapi oleh Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie

Hasil penelitian mengenai hambatan Komite dalam meningkatkan mutu pendidikan menunjukkan bahwa adanya beberapa kendala yang dihadapi komite Madrasah dalam Pelayanan peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie diantaranya adalah (1) kesibukan pribadi dari masing-masing pengurus Komite Madrasah, (2) masih adanya pengurus Komite Sekolah yang tidak melaksanakan

[94] Hasbullah, *Otonomi Pendidikan* ...., h. 92.

tugasnya. (3) Kurangnya wawasan tentang organisasi komite Sekolah, dan wawasan tentang kependidikan.

Kemudian faktor penghambat yang ada dapat diminimalisir dengan melakukan pembinaan-pembinaan terhadap Komite Madrasah dalam hal wawasan keorganisasian Komite Madrasah dan wawasan dalam bidang pendidikan. Baik mengikuti seminar-seminar pendidikan ataupun mengadakan pelatihan-pelatihan keorganisasian.

3. Upaya yang dilakukan Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya beberapa upaya yang dilakukan komite dalam peningkatan mutu pendidikan adalah (1) Mengadakan kerja sama Pihak Madrasah dengan komite Madrasah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. (2) Menekankan atau memaksimalkan waktu belajar memberdayagunaan alat bantu belajar. (3) Memberikan jam tambahan belajar khusunya kelas 6 (les sore) dalam menghadapi UN Thn 2018/2019. (4) Membuat program kerja sesuai dengan peran dan fungsi Komite Sekolah.

Hal ini sangat berkaitan dengan yang diungkapkan Hasbullah dalam bukunya Otonomi Pendidikan, komite Sekolah berfungsi sebagai berikut:

j. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
k. Melakukan upaya kerja sama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

l. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;

m. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:

   1) Kebijakan dan program pendidikan;

   2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);

   3) Kriteria kinerja satuan pendidikan;

   4) Kriteria tenaga pendidikan;

   5) Kriteria fasilitas pendidikan;

   6) Hal-hal yang terkait dengan pendidikan.

n. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;

o. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;

p. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

q. Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program Sekolah kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program Sekolah.

r. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga dan pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.[95]

[95] Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*...., h. 93.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengkaji dan mengadakan analisis tentang peran komite dalam pelayanan peningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengurus komite Madrasah sudah menjalankan perannya dengan baik, yaitu dimulai dari peran sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan di suatu pendidikan, pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan di suatu pendidikan, pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilasi penyelenggaraan dan pengeluaran dana di suatu pendidikan, serta sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat di suatu pendidikan. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa peran yang dilakukan komite Madrasah dalam pelayanan peningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie sudah cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan kepedulian komite sekolah terutama orang tua siswa untuk membantu, menunjang dan ikut serta demi kelancaran dan pengembangan pendidikan.
2. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya beberapa kendala yang dihadapi komite Madrasah dalam Pelayanan peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie diantaranya adalah (1) kesibukan pribadi dari masing-masing pengurus Komite Madrasah, (2) masih adanya pengurus Komite Madrasah yang tidak melaksanakan tugasnya. (3)

Kurangnya wawasan tentang organisasi komite Madrasah, dan wawasan tentang kependidikan. Kemudian faktor penghambat yang ada dapat diminimalisir dengan melakukan pembinaan-pembinaan terhadap Komite Madrasah dalam hal wawasan keorganisasian Komite Sekolah dan wawasan dalam bidang pendidikan. Baik mengikuti seminar-seminar pendidikan ataupun mengadakan pelatihan-pelatihan keorganisasian.

3. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya beberapa upaya yang dilakukan komite dalam peningkatan mutu pendidikan adalah (1) Mengadakan kerja sama Pihak Madrasah dengan komite Madrasah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. (2) Menekankan atau memaksimalkan waktu belajar memberdayagunaan alat bantu belajar. (3) Memberikan jam tambahan belajar khusunya kelas 6 (les sore) dalam menghadapi UN Thn 2018/2019. (4) Membuat program kerja sesuai dengan peran dan fungsi Komite Madrasah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diharapkan adalah:

1. Komite Sekolah MAN 1 Pidie harus lebih banyak lagi membuat program kerja yang berkaitan dengan perannya sebagai pengontrol (*controlling agency*), dan sebagai mediator (*mediator agency*). Dalam hal ini program kerja yang berhubungan dengan proses pembelajaran di kelas.
2. Komite Sekolah MAN 1 Pidie harus lebih sering melakukan pembangunan dalam tubuh organisasinya. Seperti mengadakan pelatihan keorganisasian untuk pengurus dan anggota Komite Sekolah, mengikuti seminar-seminar

pendidikan, dan lain sebagainya, yang dapat meningkatkan kinerja Komite Madrasah sebagai lembaga yang berguna dalam bidang pendidikan.

3. Diharapkan agar komite sekolah bisa lebih aktif berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan, maka hendaknya komite sekolah lebih meningkatkan hubungan kerja sama, baik dengan guru, orang tua siswa, maupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya, agar tercipta sikap toleransi dan saling mendukung dalam tujuan yang sama yaitu meningkatkan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Danim, Sudarwan, *Visi Baru Manajemen sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

Dirawat, dkk, *Pengantar Kepemimpinan Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983).

Djamarah, Syaiful Bahri, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 52.

E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakterisrik, dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006)..

Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

Khaeruddin dkk., *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, Cet. II (Jogjakarta: Nuansa Aksara, 2007).

Marno dan Supriyatno, Triyo, *Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).

Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Rohiat, *Manajemen Sekolah; Teori Dasar dan Praktik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).

Sukirno, *Pedoman Kerja Komite Sekolah,* (Yogyakarta: Pustaka Widyamata, 2006).

Suryadi, Ace, *Indikator mutu dan Efisiensi Pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia,* (Jakarta: Balitbang Depdikbud, 1992).

Umeidi, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah,*(Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Mene*ngah,* 2001).

Yamin, Martinis,*Profesionalisme Guru Dan Implementasi KTSP*, (Jakarta: Putra Grafika, 2009).

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FTK UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: B-6664/Un.08/FTK/KP.07.6/08/2017

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FTK UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dai Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu Menunjuk Pembimbing skripsi tersebu yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan
b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syara untuk diangkat sebagai Pembimbing Skripsi

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2012, tentang Perubahan atas peraturan pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institusi Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, Tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015,Tentang Statuta UIN Ar-Raniry; Banda Aceh
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang penetapan Institusi Agama Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Sidang/Seminar Proposal Skripsi Prodi Manajemen Pendidikan Islam FTK UIN AR-Raniry Banda Aceh tanggal 17 Juli 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Saudara:
1. Ismail Anshari — sebagai Pembimbing Pertama
2. Jamaliah Hasballah — sebagai Pembimbing Kedua

untuk membimbing Skripsi:
Nama : Maghfirazi Mulyadi
NIM : 271 324 685
Judul Skripsi : Peran komite dalam Pelayanan Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 1 Sigli Pidie

KEDUA : Pembiayaan honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut di atas dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sampai akhir semester Genap tahun Akademik 2017/2018

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dai diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada tanggal : 14 Agustus 2017
An. Rektor
Dekan,

Mujiburrahman

Tembusan

1. Rektor UIN Ar-Raniry (sebagai laporan);
2. Ketua Prodi MPI FTK
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: (0651) 7551423 - Fax. (0651) 7553020 Situs : www.tarbiyah.ar-raniry.ac.id

Nomor : B-9448 /Un.08/TU-FTK/ TL.00/10/2017 18 Oktober 2017
Lamp : -
Hal : **Mohon Izin Untuk Mengumpul Data Menyusun Skripsi**

Yth,

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini memohon kiranya saudara (i) memberi izin dan bantuan kepada:

N a m a	:	**Maghfirazi Mulyadi**
N I M	:	271324685
Prodi	:	Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Semester	:	IX
A l a m a t	:	Jl. Laksamana Malahayati, Dusun Lambateung, Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar

Untuk mengumpulkan data pada:

MAN 1 Pidie

Dalam rangka menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry yang berjudul:

Peran Komite dalam Pelayanan Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 1 Sigli Pidie

Demikianlah harapan kami atas bantuan dan keizinan serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih

An. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha,

M. Said Farzah Ali

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 PIDIE
Komplek Perkampungan Pelajar Tijue Telp.(0653) 21214
Jalan Profesor A. Majid Ibrahim KM. 114 – Kode Pos : 24151
NSM : 131111070001

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B-124/Ma.01.53 /TL.00.1/11/2017

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Pidie Kabupaten Pidie,

Nama	: Mustafa, S.Ag
NIP	: 197003081996031002
Jabatan	: Kepala Madrasah

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: **Maghfirazi Mulyadi**
NPM	: 271324685
Prodi	: Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Universitas	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Pidie Kabupaten Pidie pada tanggal 2 s/d 4 November 2017 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ***"Peran Komite dalam Pelayanan Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 1 Sigli Pidie".***

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sigli, 6 November 2017
Kepala,

KEMENTERIAN AGAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KABUPATEN PIDIE REPUBLIK INDONESIA

Mustafa

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN PERAN KOMITE DALAM PELAYANAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI MAN 1 PIDIE

No	variabel	Indikator	Sumber data	Metode
1	konteks	1. Perencanaan Program 2. Pengelolaan sumber daya 3. Pengontrol perencana pendidikan di madrasah 4. Memantau program sekolah	1. Komite sekolah 2. Kepala sekolah	1. Wawancara 2. Analisis dokumen 3. observasi
2	Input	1. peningkatan kinerja komite sekolah 2. peningkatan mutu dan sarana prasarana di madrasah 3. pendanaan	1. Komite sekolah 2. Kepala sekolah 3. Guru 4. Dokumen	1. Wawancara 2. Analisis dokumen 3. Observasi
3	Proses	1. penyusunan program 2. memantau pelaksanaan program dan pengeloalaan sumber daya pendidikan 3. pengelolaan sarana dan prasarana 4. memfasilitasi sekolah dengan *stakeholder*	1. Komite sekolah 2. Kepala sekolah 3. Guru 4. Orang tua/wali 5. Dokumen	1. Wawancara 2. Analisis dokumen 3. Observasi

4	Produk	1. keputusan yang dihasilkan komite sekolah 2. hasil pelaksanaan kinerja komite sekolah 3. akibat pelaksanaan kinerja komite sekolah	1. Komite sekolah 2. Kepala sekolah 3. Guru 4. Orang tua/wali 5. Dokumen	1. Wawancara 2. Analisis dokumen 3. Observasi
5	Hambatan dan saran	1. faktor yang menjadi hambatan kinerja komite sekolah 2. saran dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja komite sekolah	1. Komite sekolah 2. Kepala sekolah 3. Guru 4. Orang tua/wali	1. Wawancara 2. Analisis dokumen 3. Observasi

Pertanyaan untuk Kepala Sekolah

1. Bagaimana proses pembentukan komite Madrasah di MAN 1 Pidie?
2. Apakah ada kriteria khusus dalam pembentukan komite Madrasah di MAN 1 Pidie?
3. Bagaimana pelayanan yang diberikan komite dalam pemberian pertimbangan di MAN 1 Pidie?
4. Bagaimana kinerja dan program kerja komite Madrasah dalam perencanaan proses pengelolaan pendidikan di MAN 1 Pidie?
5. Bagaimana komite memberikan pertimbangan dalam menyusun RAPBM?
6. Bagaimana komite memberikan masukan atau usulan terhadap pengelolaan pendidikan?
7. Bagaimana pertimbangan komite Madrasah untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan di Sekolah?
8. Bagaimana komite Madrasah memantau kondisi ketenagaan pendidikan di Sekolah?
9. Bagaimana komite mengkoordinasikan sarana prasarana di Madrasah?
10. Bagaimana komite Madrasah mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di Sekolah?
11. Bagaimana komite Sekolah mengawasi proses pengambilan keputusan di Madrasah?
12. Bagaimana komite mengontrol proses pelaksanaan pendidikan di Madrasah?
13. Apa kendala yang dihadapi dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie?
14. Langkah-langkah apa yang diambil dalam mengatasi masalah tersebut?
15. Bagaimana upaya komite Sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di MAN 1 Pidie?

Pertanyaan untuk Ketua Komite Sekolah

1. Bagaimana proses pembentukan komite Madrasah di MAN 1 Pidie?
2. Apakah ada kriteria khusus dalam pembentukan komite Madrasah di MAN 1 Pidie?
3. Bagaimana kinerja dan program kerja komite Madrasah dalam perencanaan proses pengelolaan pendidikan di MAN 1 Pidie?
4. Bagaimana peran komite Madrasah dalam penyusunan RAPBM?
5. Bagaimana komite memberikan pertimbangan dalam menyusun RAPBM?
6. Bagaimana komite memberikan masukan atau usulan terhadap pengelolaan pendidikan?
7. Bagaimana pertimbangan komite Madrasah untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan di Sekolah?
8. Bagaimana komite mengkoordinasikan sarana prasarana di Madrasah?"
9. Bagaimana komite Madrasah mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di Sekolah?
10. Bagaimana komite Sekolah mengawasi proses pengambilan keputusan di Madrasah?
11. Bagaimana komite mengontrol proses pelaksanaan pendidikan di Madrasah?
12. Langkah-langkah apa yang diambil dalam mengatasi masalah tersebut?
13. Apa kendala yang dihadapi dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie?
14. Bagaimana cara agar kendala tersebut dapat diminimalisir untuk terjadi?
15. Bagaimana upaya komite Sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di MAN 1 Pidie?

Pertanyaan untuk Sekretaris Komite Sekolah

1. Bagaimana proses pembentukan komite Madrasah di MAN 1 Pidie?
2. Apakah ada kriteria khusus dalam pembentukan komite Madrasah di MAN 1 Pidie?
3. Bagaimana kinerja dan program kerja komite Madrasah dalam perencanaan proses pengelolaan pendidikan di MAN 1 Pidie?
4. Bagaimana peran komite Madrasah dalam penyusunan RAPBM?
5. Bagaimana komite memberikan pertimbangan dalam menyusun RAPBM?
6. Bagaimana komite memberikan masukan atau usulan terhadap pengelolaan pendidikan?
7. Bagaimana pertimbangan komite Madrasah untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan di Sekolah?
8. Bagaimana komite mengkoordinasikan sarana prasarana di Madrasah?"
9. Bagaimana komite Madrasah mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di Sekolah?
10. Bagaimana komite Sekolah mengawasi proses pengambilan keputusan di Madrasah?
11. Bagaimana komite mengontrol proses pelaksanaan pendidikan di Madrasah?
12. Langkah-langkah apa yang diambil dalam mengatasi masalah tersebut?
13. Apa kendala yang dihadapi dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie?
14. Bagaimana cara agar kendala tersebut dapat diminimalisir untuk terjadi?
15. Bagaimana upaya komite Sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di MAN 1 Pidie?

Pertanyaan untuk Guru

1. Seberapa penting keberadaan komite Madrasah di MAN 1 Pidie?
2. Bagaimana kinerja dan program kerja komite Madrasah dalam perencanaan proses pengelolaan pendidikan di MAN 1 Pidie?
3. Bagaimana komite memberikan masukan atau usulan terhadap pengelolaan pendidikan?
4. Bagaimana pertimbangan komite Madrasah untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan di Sekolah?
5. Bagaimana komite mengkoordinasikan sarana prasarana di Madrasah?"
6. Bagaimana komite Madrasah mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di Sekolah?
7. Bagaimana komite Sekolah mengawasi proses pengambilan keputusan di Madrasah?
8. Bagaimana komite mengontrol proses pelaksanaan pendidikan di Madrasah?
9. Apa kendala yang dihadapi dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie?
10. Langkah-langkah apa yang diambil dalam mengatasi masalah tersebut?
11. Bagaimana cara agar kendala tersebut dapat diminimalisir untuk terjadi?
12. Bagaimana upaya komite Sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di MAN 1 Pidie?

Pertanyaan untuk Orang tua siswa

1. Seberapa penting keberadaan komite Madrasah di MAN 1 Pidie?
2. Bagaimana kinerja dan program kerja komite Madrasah dalam perencanaan proses pengelolaan pendidikan di MAN 1 Pidie?
3. Bagaimana komite memberikan masukan atau usulan terhadap pengelolaan pendidikan?
4. Bagaimana pertimbangan komite Madrasah untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan di Sekolah?
5. Bagaimana komite mengkoordinasikan sarana prasarana di Madrasah?"
6. Bagaimana komite Madrasah mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di Sekolah?
7. Bagaimana komite Sekolah mengawasi proses pengambilan keputusan di Madrasah?
8. Bagaimana komite mengontrol proses pelaksanaan pendidikan di Madrasah?
9. Apa kendala yang dihadapi dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 Pidie?
10. Langkah-langkah apa yang diambil dalam mengatasi masalah tersebut?
11. Bagaimana cara agar kendala tersebut dapat diminimalisir untuk terjadi?
12. Bagaimana upaya komite Sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di MAN 1 Pidie?

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1. Wawancara dengan Ketua Komite Sekolah MAN 1 Pidie

Gambar 2. Wawancara dengan Sekretaris Komite Sekolah MAN 1 Pidie

Gambar 3. Wawancara dengan Kepala Sekolah MAN 1 Pidie

DAFTAR R IWAYAT HIDUP

Nama	: Maghfirazi Mulyadi
Tempat/TanggalLahir	: Sigli, 30 Januari 1996
Alamat	: Kajhu, Dusun Lambateung Kec. Baitussalam
JenisKelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Kebangsaan/Suku	: Indonesia/Aceh
Status	: Belum Menikah
Pekerjaan	: Mahasiswa
IPK	: 3,24
No. Hp	: 085207205069

Nama Orang Tua

a.	Ayah	: Abraham
	Pekerjaan	: Wiraswasta
b.	Ibu	: Sudiharni
	Pekerjaan	: PNS (Pensiunan)

Wali

Nama	: Abraham
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Sigli, Pante Teungoh Kec. Kota Sigli

Riwayat Pendidikan :

SDN 1 Sigli	Tahun Tamat 2007
MTsN Jeumala Amal	TahunTamat 2010
MAN Jeumala Amal	TahunTamat 2013
UIN Ar-Raniry Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	TahunTamat 2017

Banda Aceh,
Penulis

Maghfirazi Mulyadi